



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 25 Mei 2026

Nomor : 49/T/S-HP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025

**Kepada Yth.
Wali Kota Payakumbuh
di
Payakumbuh**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman belum memadai sehingga mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan minimal sebesar Rp44.224.561,07;
- b. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp848.551.600,00; dan
- c. Kekurangan volume dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi empat paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada empat SKPD serta pembayaran harga satuan timpang atas penambahan volume pekerjaan Relokasi Puskesmas Parit Rantang (DAK) pada Dinas Kesehatan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp377.557.187,10.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Payakumbuh antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala BKD untuk menginstruksikan Kepala Bidang Pendapatan supaya melakukan pemeriksaan menyeluruh atas kepatuhan pembayaran PBJT Makanan dan/atau Minuman dan menetapkan pajak terhutang sesuai ketentuan minimal sebesar Rp38.594.947,07;
- b. Sekretaris DPRD untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp848.551.600,00 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkannya ke RKUD; dan
- c. Kepala Dinas Koperasi dan UKM dan Kepala Dinas Kesehatan untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp338.065.179,20 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkannya ke RKUD.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 24.A/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026 dan Nomor 24.B/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026 masing-masing bertanggal 22 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Payakumbuh, kami ucapkan terima kasih.



Kepala BPK Perwakilan, **R**
Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFrA.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2025**



Nomor : 24.A/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026

Tanggal : 22 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Padang, 25137
Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2025**

Nomor : 24.A/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026

Tanggal : 22 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Padang, 25137
Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811**

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2025**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025 terdiri atas dua laporan, yaitu:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.

Laporan ini memuat:

- a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
- b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan
- c. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh (Buku I) harus ditandatangani oleh Wali Kota untuk seluruh komponen Laporan Keuangan tanpa tanggal dan tempat serta harus memuat Pernyataan Tanggung Jawab Wali Kota.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Laporan ini memuat:

- a. Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun Sebelumnya.



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	ii
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	1
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Payakumbuh bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Payakumbuh. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 24.B/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026 tanggal 22 Mei 2026 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Padang, 22 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFrA.
Register CSFA Nomor R.00103

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kota Payakumbuh yang memiliki 31 SKPD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh yang terdiri atas:

- a. Neraca per 31 Desember 2025;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan SAL (LPSAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2025;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;

- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 32 hari kalender mulai tanggal 11 Februari s.d. 14 Maret 2026 berdasarkan Surat Tugas Nomor 74/T/ST/DJPKN-V.PDG/PPD.01/02/2026 tanggal 9 Februari 2026 dan selama 33 hari kalender mulai tanggal 29 Maret s.d. 30 April 2026 berdasarkan Surat Tugas Nomor 143/T/ST/DJPKN-V.PDG/PPD.01/03/2026 tanggal 26 Maret 2026.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dipimpinnya. Disamping itu, Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh sebagai Entitas Pelaporan berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan APBD.

Sejalan dengan Pasal 320 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan telah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan.

Laporan Keuangan disusun dan disampaikan kepada kelompok utama Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, namun tidak terbatas pada masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa serta pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan juga pemerintah. Diharapkan, melalui media pelaporan ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Payakumbuh, 22 Mei 2026
WALIKOTA PAYAKUMBUH

ZULMAETA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	viii
LAPORAN KEUANGAN	
A. Laporan Realisasi Anggaran	
B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	
C. Neraca	
D. Laporan Operasional	
E. Laporan Arus Kas	
F. Laporan Perubahan Ekuitas	
G. Catatan atas Laporan Keuangan	
1. Pendahuluan	1
1.1 Informasi Umum	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	5
1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	6
2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Mencapai Target Kinerja.....	8
2.1 Ekonomi Makro	8
2.2 Kebijakan Keuangan	18
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	75
3. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	77
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan.....	77
3.2 Hambatan/Kendala yang ada dalam Pencapaian Target	85
4. Kebijakan Akuntansi	87
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	87
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	88

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	91
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi	101
5. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	136
5.1. Laporan Realisasi Anggaran.....	136
5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	162
5.3 Neraca	164
5.4 Laporan Operasional	231
5.5. Laporan Arus Kas	248
5.6. Laporan Perubahan Ekuitas	255
5.7. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan.....	262
6. Informasi Keuangan Lainnya	263
6.1 Penerimaan Dana APBN	263
6.2 Penerimaan Daerah dalam Bentuk Barang	263
6.3 Kontijensi Atas Permasalahan Hukum	264
6.4 Belanja <i>Mandatory Spending</i>	265
7. Penutup	267



DAFTAR TABEL

Halaman

1.	Pendahuluan	
2.	Ekonomi Makro, Kebijakan Akuntansi dan Pencapaian Target Kinerja	
2.1	Asumsi Makro Ekonomi Tahun 2025	11
2.2	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kota Payakumbuh Menurut Lapangan Usaha (persen) Periode 2020—2024	13
2.3	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Payakumbuh.....	17
2.4	Perbandingan Jenis Pungutan Pajak	21
2.5	Perbandingan Jenis Pungutan Retribusi Daerah.....	23
2.6	Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022-2025	30
2.7	Ringkasan Perubahan Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025	33
2.8	Belanja Daerah Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	65
2.9	Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2025	75
2.10	Perubahan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	75
3.	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	
3.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025.....	82
3.2	Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 dan 2024.....	83
3.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025.....	84
3.4	Perbandingan Realisasi Belanja Anggaran 2025 dan 2024.....	85
4.	Kebijakan Akuntansi	
4.1	Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	105
4.2	Penyisihan Piutang Retribusi Tidak Tertagih	105
4.3	Penyisihan Piutang Bukan Pajak dan Retribusi Tidak Tertagih	106
4.4	Masa Manfaat Aset Tetap	116
5.3.	Neraca	
5.3.1	Sisa Dana Alokasi Khusus Fisik Per 31 Desember 2025	166
5.3.2	Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Per 31 Desember 2025	166
5.3.3	Sisa Dana Insentif Fiskal Per 31 Desember 2025	167
5.3.4	Sisa Dana Alokasi Umum Per 31 Desember 2025	167
5.3.5	Sisa Pendapatan Asli Daerah Per 31 Desember 2025.....	167
5.3.6	Sisa DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Per 31 Desember 2025.....	168
5.3.7	Sisa Kas BLUD Per 31 Desember 2025	169

5.3.8	Kas Pada Rekening Penerimaan dan Pengeluaran BLUD Per 31 Desember 2025..	169
5.3.9	Sisa kas BOK Per 31 Desember 2025	172
5.3.10	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2025.....	173
5.3.11	Pelunasan Piutang PBB P2 Tahun 2025	174
5.3.12	Rincian Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2025.....	175
5.3.13	Rincian Mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2025	176
5.3.14	Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025.....	178
5.3.15	Rincian Mutasi Piutang DBH Pajak Tahun 2025.....	180
5.3.16	Rincian Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2025	180
5.3.17	Mutasi Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025.....	182
5.3.18	Mutasi Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi Tahun 2025.....	183
5.3.19	Mutasi Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025.....	184
5.3.20	Rincian Beban Jasa Dibayar Dimuka TA 2025 dan 2023.....	185
5.3.21	Daftar Rincian Mitra Pemanfaat dalam Cash Program KPKNL Tahun 2024 dan 2023.....	190
5.3.22	Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2025.....	192
5.3.23	Hibah Masuk Aset Tanah Tahun 2025	196
5.3.24	Daftar Extracomptabel Tahun 2025	203
5.3.25	Reklasifikasi Kurang Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025.....	213
5.3.26	Tabel Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2025.....	219
5.4.	Laporan Operasional	
5.4.1	Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025.....	232
5.4.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025	234
5.4.3	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025.....	236
5.4.4	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2025.....	237
5.4.5	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2025	237
5.4.6	Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025.....	246
5.4.7	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025.....	246
5.5.	Laporan Arus Kas	
5.5.1	Rincian Penerimaan PFK	251
5.5.2	Rincian Penyetoran PFK	253
5.6.	Laporan Perubahan Ekuitas	
5.6.1	Rincian Koreksi Tambah Aset Tanah Dinas PUPR Tahun 2025.....	259

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Sisa Dana BOSP 2025
- Lampiran 2 : Rekap Piutang dan Penyisihan Tahun 2025
- Lampiran 3 : Rekapitulasi Persediaan per SKPD Tahun 2025
- Lampiran 4 : Rincian Persediaan Tahun 2025
- Lampiran 5 : Hibah Persediaan Tahun 2025
- Lampiran 6 : Laporan Keuangan PDAM Tahun 2025
- Lampiran 7 : Hibah Tanah Tahun 2025
- Lampiran 8 : Rekapitulasi Aset Tetap Tanah Tahun 2025
- Lampiran 9 : Penambahan Sertifikat Tanah Tahun 2025
- Lampiran 10 : Hibah Peralatan dan Mesin Tahun 2025
- Lampiran 11 : SK Penghapusan Tahun 2025
- Lampiran 12 : Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025
- Lampiran 13 : Rekapitulasi Aset Ekstra Komptabel Tahun 2025
- Lampiran 14 : Daftar Barang Ekstra Komptabel Pengadaan Tahun 2025
- Lampiran 15 : Hibah Gedung dan Bangunan Tahun 2025
- Lampiran 16 : Rekapitulasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025
- Lampiran 17 : Hibah Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025
- Lampiran 18 : Rekapitulasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025
- Lampiran 19 : Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2025
- Lampiran 20 : Rekapitulasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025
- Lampiran 21 : Rekapitulasi Aset Tetap dan Aset Lainnya serta Akumulasi Penyusutan Tahun 2025
- Lampiran 22 : Rekap Tuntutan Perbendaharaan Tahun 2003 s.d 2025
- Lampiran 23 : Rekapitulasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025
- Lampiran 24 : Rekapitulasi Aset Rusak Berat/ Usang Tahun 2025
- Lampiran 25 : Nama Paternak Penerima Sapi Bibit Bantuan Pemerintah
- Lampiran 26 : Rekap Utang Beban Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025
- Lampiran 27 : Belanja Mandatory Bidang Infrastruktur Palayanan Publik Tahun 2025
- Lampiran 28 : Belanja Mandatory Bidang Pendidikan Tahun 2025



WALI KOTA PAYAKUMBUH

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Payakumbuh, Mei 2026

WALI KOTA PAYAKUMBUH

ZULMAETA



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
4.	<u>PENDAPATAN</u>				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	157.990.952.046,00	166.878.567.156,00	105,63	138.649.853.624,00
4.1.01.	Pajak Daerah	41.080.651.214,00	44.752.209.670,00	108,94	23.691.080.250,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	92.534.636.288,00	96.656.956.695,00	104,45	92.815.819.897,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.275.525.706,00	13.275.525.706,00	100,00	12.381.453.735,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	11.100.138.838,00	12.193.875.085,00	109,85	9.761.499.742,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	604.804.101.469,00	611.557.713.708,00	101,12	613.134.671.289,00
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	574.958.593.689,00	579.808.401.303,00	100,84	575.781.818.001,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.845.507.780,00	31.749.312.405,00	106,38	37.352.853.288,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	4.000.000.000,00	0,00	1.536.000.000,00
4.3.01.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	1.536.000.000,00
4.3.02.	Dana Darurat	0,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	762.795.053.515,00	782.436.280.864,00	102,57	753.320.524.913,00
5.	<u>BELANJA</u>				
5.1	BELANJA OPERASI	738.081.315.556,00	671.418.452.358,00	90,97	668.220.386.847,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	427.783.039.819,00	381.919.511.232,00	89,28	376.394.619.531,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	287.002.812.574,00	266.704.269.431,00	92,93	261.363.190.982,00
5.1.05.	Belanja Hibah	22.270.963.163,00	21.829.971.695,00	98,02	27.373.461.334,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	1.024.500.000,00	964.700.000,00	94,16	3.089.115.000,00
5.2	BELANJA MODAL	106.201.784.050,00	94.027.132.612,00	88,54	73.985.819.648,00
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	1.647.190.400,00	1.598.164.430,00	97,02	834.832.535,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.700.361.892,00	38.662.905.255,00	82,79	21.973.427.518,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.429.352.556,00	26.140.617.432,00	88,82	17.929.842.688,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	26.167.197.162,00	25.423.870.469,00	97,16	30.784.644.322,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.234.682.040,00	2.178.598.026,00	97,49	2.459.672.585,00
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	23.000.000,00	22.977.000,00	99,90	3.400.000,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	6.726.011.484,00	4.500.000,00	0,07	518.850.784,00
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	6.726.011.484,00	4.500.000,00	0,07	518.850.784,00
	JUMLAH BELANJA	851.009.111.090,00	765.450.084.970,00	89,95	742.725.057.279,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	851.009.111.090,00	765.450.084.970,00	89,95	742.725.057.279,00
	SURPLUS (DEFISIT)	(88.214.057.575,00)	16.986.195.894,00	(19,26)	10.595.467.634,00

KODE AKUN	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	88.214.057.575,00	88.214.057.575,00	100,00	85.118.589.941,00
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	88.214.057.575,00	88.214.057.575,00	100,00	85.118.589.941,00
6.1.06.	dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	7.500.000.000,00
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	7.500.000.000,00
6.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETO	88.214.057.575,00	88.214.057.575,00	100,00	77.618.589.941,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	105.200.253.469,00		88.214.057.575,00



 WALIKOTA PAYAKUMBUH,

 ZULMAETA



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN PERUBAHAN SAL
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	REF	2025	2024
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	88.214.057.575,00	85.118.589.941,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	88.214.057.575,00	85.118.589.941,00
3	Subtotal (1-2)		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	105.200.253.469,00	88.214.057.575,00
5	Subtotal (3+4)		105.200.253.469,00	88.214.057.575,00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
7	Lain-Lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	5.2.4	105.200.253.469,00	88.214.057.575,00

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

ZULMAETA



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	2025	2024
1	ASET		
1.1.	ASET LANCAR		
1.1.01.	Kas dan Setara Kas	105.200.253.469,00	88.284.471.463,00
1.1.01.01.	Kas di Kas Daerah	90.772.239.467,00	70.623.246.570,00
1.1.01.02.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
1.1.01.03.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
1.1.01.04.	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	13.669.139.900,00	16.332.476.208,00
1.1.01.05.	Kas di BOS	0,00	60.266.693,00
1.1.01.07.	Kas Lainnya	0,00	1.268.481.992,00
1.1.01.10.	Kas Dana BOSP	98.178.571,00	0,00
1.1.01.11.	Kas Dana BOK Puskesmas	660.695.531,00	0,00
	Piutang Pendapatan	51.450.929.946,00	31.763.804.924,00
1.1.03.	Piutang Pajak Daerah	15.330.739.636,00	14.240.275.820,00
1.1.04.	Piutang Retribusi	10.424.704.992,00	11.501.233.974,00
1.1.06.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	692.956.233,00	532.959.797,00
1.1.07	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.226.281.000,00	525.723.278,00
1.1.08.	Piutang Transfer Antar Daerah	19.776.248.085,00	4.963.612.055,00
1.1.10.	Penyisihan Piutang	(12.290.906.270,00)	(10.627.438.757,00)
1.1.11.	Beban Dibayar Dimuka	116.630.213,00	393.643.648,00
1.1.12.	Persediaan	15.555.857.169,00	12.793.121.398,00
	Jumlah Aset Lancar	160.032.764.527,00	122.607.602.676,00
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1.2.01.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	17.559.263.655,00	17.701.322.764,00
1.2.02.	Investasi Jangka Panjang Permanen	136.535.572.539,00	134.470.865.571,00
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	154.094.836.194,00	152.172.188.335,00
1.3.	ASET TETAP		
1.3.01.	Tanah	338.877.314.970,00	331.862.903.168,00
1.3.02.	Peralatan dan Mesin	447.324.817.635,00	409.419.616.950,00
1.3.03.	Gedung dan Bangunan	612.195.893.988,00	586.988.093.137,00
1.3.04.	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.006.061.438.117,00	963.660.528.489,00
1.3.05.	Aset Tetap Lainnya	34.907.991.490,00	32.720.641.583,00
1.3.06.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.669.193.969,00	5.890.347.807,00
1.3.07.	Akumulasi Penyusutan	(1.124.139.710.114,00)	(1.052.090.833.001,00)
	Jumlah Aset Tetap	1.320.896.940.055,00	1.278.451.298.133,00

KODE AKUN	URAIAN	2025	2024
1.5.	ASET LAINNYA		
1.5.01.	Tagihan Jangka Panjang	724.375.988,00	724.375.988,00
1.5.02.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.256.000.000,00	2.256.000.000,00
1.5.03.	Aset Tidak Berwujud	5.299.049.230,00	5.637.871.332,00
1.5.04.	Aset Lain-lain	604.662.012,00	1.933.447.293,00
1.5.07.	Dana Tranfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	0,00	222.895.000,00
	Jumlah Aset Lainnya	8.884.087.230,00	10.774.589.613,00
1.6.	PROPERTI INVESTASI		
1.6.01.	Properti Investasi Tanah	636.344.000,00	636.344.000,00
1.6.02.	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	610.804.000,00	610.804.000,00
1.6.04.	Akumulasi Properti Investasi	(221.562.560,00)	(209.346.480,00)
	Jumlah Properti Investasi	1.025.585.440,00	1.037.801.520,00
	JUMLAH ASET	1.644.934.213.446,00	1.565.043.480.277,00
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2.1.01.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2.1.05.	Pendapatan Diterima Dimuka	44.063.333,00	80.128.279,00
2.1.06.	Utang Belanja	27.568.584.820,00	32.415.721.171,00
2.1.07.	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	74.913.888,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	27.612.648.153,00	32.570.763.338,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	27.612.648.153,00	32.570.763.338,00
3.	EKUITAS		
3.1.	EKUITAS	1.617.321.565.293,00	1.532.472.716.939,00
	JUMLAH EKUITAS	1.617.321.565.293,00	1.532.472.716.939,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.644.934.213.446,00	1.565.043.480.277,00


 WALI KOTA PAYAKUMBUH,
 ZULMAETA

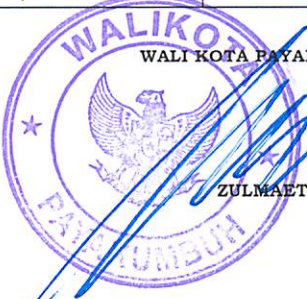


PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
L A P O R A N O P E R A S I O N A L
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7.	PENDAPATAN DAERAH-LO				
7.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	168.375.873.913,00	144.291.514.153,00	24.084.359.760,00	16,69
7.1.01.	Pajak Daerah-LO	45.843.211.745,00	24.860.690.455,00	20.982.521.290,00	84,40
7.1.02.	Retribusi Daerah-LO	95.302.540.286,00	95.869.831.879,00	(567.291.593,00)	(0,59)
7.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	15.115.782.564,00	14.487.162.627,00	628.619.937,00	4,34
7.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah-LO	12.114.339.318,00	9.073.829.192,00	3.040.510.126,00	33,51
7.2.	PENDAPATAN TRANSFER-LO	619.319.459.105,00	606.277.244.653,00	13.042.214.452,00	2,15
7.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	579.585.506.303,00	573.998.813.001,00	5.586.693.302,00	0,97
7.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	39.733.952.802,00	32.278.431.652,00	7.455.521.150,00	23,10
7.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	22.437.771.653,00	5.883.854.793,00	16.553.916.860,00	281,34
7.3.01.	Pendapatan Hibah-LO	18.437.771.653,00	5.883.854.793,00	12.553.916.860,00	213,36
7.3.02.	Dana Darurat-LO	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	100,00
7.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	810.133.104.671,00	756.452.613.599,00	53.680.491.072,00	7,10
8.	BEBAN DAERAH				
8.1.	BEBAN OPERASI	665.980.513.589,00	687.588.280.209,00	(21.607.766.620,00)	(3,14)
8.1.01.	Beban Pegawai	382.014.065.695,00	382.604.307.202,00	(590.241.507,00)	(0,15)
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	260.668.646.614,00	268.702.833.832,00	(8.034.187.218,00)	(2,99)
8.1.05.	Beban Hibah	21.829.971.695,00	32.694.030.116,00	(10.864.058.421,00)	(33,23)
8.1.06.	Beban Bantuan Sosial	964.700.000,00	3.089.115.000,00	(2.124.415.000,00)	(68,77)
8.1.07.	Beban Penyisihan Piutang	419.018.373,00	422.377.535,00	(3.359.162,00)	(0,80)
8.1.09.	Beban Penyisihan Investasi Non Permanen	84.111.212,00	75.616.524,00	8.494.688,00	11,23
8.2.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	73.054.571.784,00	71.751.809.406,00	1.302.762.378,00	1,82
8.4.	BEBAN TAK TERDUGA	4.500.000,00	518.850.784,00	(514.350.784,00)	(99,13)
	JUMLAH BEBAN	739.039.585.373,00	759.858.940.399,00	(20.819.355.026,00)	(2,74)
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI	71.093.519.298,00	(3.406.326.800,00)	74.499.846.098,00	(2.187,10)
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(1.914.040.329,00)	(559.051.564,00)	(1.354.988.765,00)	242,37
7.4.	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO				
7.4.01.	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	215.504.816,00	(215.504.816,00)	(100,00)
	Jumlah Surplus Non Operasional - LO	0,00	215.504.816,00	(215.504.816,00)	(100,00)

KODE AKUN	URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8.5.	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO				
8.5.01.	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	233.937.857,00	0,00	233.937.857,00	0,00
8.5.03.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	1.680.102.472,00	774.556.380,00	905.546.092,00	116,91
	Jumlah Defisit Non Operasional-LO	1.914.040.329,00	774.556.380,00	1.139.483.949,00	147,11
	SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	69.179.478.969,00	(3.965.378.364,00)	73.144.857.333,00	(1.844,59)
	POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	69.179.478.969,00	(3.965.378.364,00)	73.144.857.333,00	(1.844,59)


 WALIKOTA PAYAKUMBUH,
 ZULMAETA



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

LAPORAN ARUS KAS

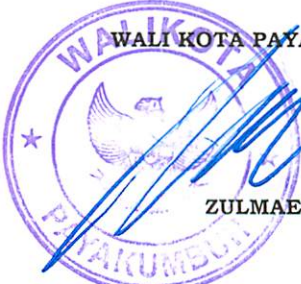
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	JUMLAH (Rp)	
		TAHUN 2025	TAHUN 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Masuk Kas	5.5.1.1.		
Penerimaan Pajak Daerah		44.752.209.670,00	23.691.080.250,00
Penerimaan Retribusi Daerah		96.656.956.695,00	92.815.819.897,00
Penerimaan Hasil Kekayaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		13.275.525.706,00	12.381.453.735,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		11.937.405.085,00	9.089.106.326,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		7.358.174.200,00	6.790.957.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		1.650.116.000,00	4.505.110.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Lainnya		787.832.000,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		462.467.647.730,00	453.856.467.847,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik		16.570.513.841,00	11.649.788.700,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik		82.302.261.532,00	80.003.729.454,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		8.671.856.000,00	18.975.765.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		31.749.312.405,00	37.352.853.288,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Penerimaan Hibah		0,00	1.536.000.000,00
Penerimaan Dana Darurat		4.000.000.000,00	0,00
Penerimaan Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		782.179.810.864,00	752.648.131.497,00
Arus Keluar Kas	5.5.1.2.		
Pembayaran Pegawai		381.919.511.232,00	376.394.619.531,00
Pembayaran Barang		266.704.269.431,00	261.363.190.982,00
Pembayaran Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Hibah		21.829.971.695,00	27.373.461.334,00
Pembayaran Bantuan Sosial		964.700.000,00	3.089.115.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Pembayaran Tak Terduga		4.500.000,00	518.850.784,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		671.422.952.358,00	668.739.237.631,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1.3.	110.756.858.506,00	83.908.893.866,00

URAIAN	REF	JUMLAH (Rp)	
		TAHUN 2025	TAHUN 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Masuk Kas	5.5.2.1.		
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		11.216.000,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		245.254.000,00	672.393.416,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		256.470.000,00	672.393.416,00
Arus Keluar Kas	5.5.2.2.		
Perolehan Tanah		1.598.164.430,00	834.832.535,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		38.662.905.255,00	21.973.427.518,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		26.140.617.432,00	17.929.842.688,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		25.423.870.469,00	30.784.644.322,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		2.178.598.026,00	2.459.672.585,00
Perolehan Aset Lainnya		22.977.000,00	3.400.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	7.500.000.000,00
Pengeluaran Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		94.027.132.612,00	81.485.819.648,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2.3.	(93.770.662.612,00)	(80.813.426.232,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN	5.5.3		
Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	5.5.3.3	0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TANSITORIS/NON ANGGARAN	5.5.4		
Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
Penerimaan Penghitungan Pihak Ketiga (PFK)		71.395.123.878,00	66.529.706.120,00
Penerimaan untuk Pengembalian Dana BOP Paud		0,00	222.163.888,00
Jumlah Arus Masuk Kas		71.395.123.878,00	66.751.870.008,00

URAIAN	REF	JUMLAH (Rp)	
		TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		71.395.123.878,00	66.529.706.120,00
Pengeluaran untuk Pengembalian Dana BOP Paud		70.413.888,00	151.750.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		71.465.537.766,00	66.681.456.120,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	5.5.4.3	(70.413.888,00)	70.413.888,00
Kenaikan/Penurunan Kas		16.915.782.006,00	3.165.881.522,00
Saldo Awal Kas		88.284.471.463,00	85.118.589.941,00
Kas di BUD		70.623.246.570,00	64.627.882.240,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Kas di BLUD		16.332.476.208,00	18.276.255.522,00
Kas di BOS		60.266.693,00	39.827.010,00
Kas Lainnya		1.268.481.992,00	2.174.625.169,00
Saldo Akhir Kas		105.200.253.469,00	88.284.471.463,00
Kas di BUD		90.772.239.467,00	70.623.246.570,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Kas di BLUD		13.669.139.900,00	16.332.476.208,00
Kas di BOSP		98.178.571,00	60.266.693,00
Kas di BOK Puskesmas		660.695.531,00	1.268.481.992,00


 WALI KOTA PAYAKUMBUH,
 ZULMAETA



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	REF	2025	2024
1	Ekuitas Awal	5.6.1	1.532.472.716.939,00	1.536.925.751.573,00
2	Surplus/(Defisit)-LO	5.6.2	69.179.478.969,00	(3.965.378.364,00)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	5.6.3	15.669.369.385,00	(487.656.270,00)
	Koreksi Nilai Persediaan			
	Lain-Lain		15.669.369.385,00	(487.656.270,00)
4	RK-PPKD		0,00	0,00
	Ekuitas Akhir	5.6.4	1.617.321.565.293,00	1.532.472.716.939,00

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

ZULMAETA